**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

* 1. **Kesimpulan**

1. Variabel kekayaan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dibuktikan dengan memiliki nilai signfikansi < 0.05 yaitu 0.001. Variabel kekayaan daerah yang diukur dengan PAD ini sangat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Besarnya jumlah PAD yang diterima telah menggambarkan besarnya kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengekspolari atau menggali pendapatan asli daerah tersebut.
2. Tingkat ketergantungan keuangan daerah yang diukur dengan perbandingan dana perimbangan dengan total penerimaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dibuktikan dengan memperoleh nilai signifikansi > 0.05 yaitu 0.5965. Hal ini disebabkan pemerintah provinsi di Indoensia masih didominasi oleh dana alokasi umum dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tersebut tidak berperan aktif dalam memperoleh pendapatannya.
3. Ukuran daerahpemerintah provinsi di Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dibuktikan dengan diperolehnya nilai signifikansi > 0,05 yaitu 0.1043. Hal ini disebabkan jumlah aset pemerintah daerah bukan merupakan faktor utama dalam mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melainkan manajemen terhadap pengelolaan aset yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4. Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi di Indonesia tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dibuktikan dengan memperoleh nilai signfikansi > 0.05 berupa 0.6929. Hal ini disebabkan oleh realisasi belanja barang dan jasa yang masih dominan dibandingkan dengan belanja modal atau belanja pegawai yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.
5. Kekayaan daerah, tingkat ketergantungan keuangan daerah, ukuran daerah dan belanja daerah telah memberikan kontribusi sebesar 72.62 persen terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.
   1. **Saran**
6. Pemerintah daerah provinsi di Indonesia diharapkan untuk terus mengembangkan potensi penghasilan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil pajak maupun sumber daya alam optimal sehingga dana yang dihasilkan dari potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan dan infrastruktur daerah.
7. Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan pengelolaan aset yang dimiliki secara optimal sehingga belanja modal dapat dialokasikan ke aset lain yang belum dimiliki oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah tingkat provinsi di Indonesia selama 3 tahun, penelitian selanjutnya dapat menggunakan data Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota atau secara nasional dengan jangka waktu yang lebih lama.
9. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya menjelaskan 72.62% dari variabel dependen, diharapkan bagi penelitian yang sama di masa yang akan datang untuk menambahkan proksi lain atau menggunakan variabel lain yang bersifat non keuangan, seperti leverage, tingkat pertumbuhan ekonomi, luas daerah, jumlah OPD, jumlah pegawai, jumlah fasilitas umum, jumlah kasus temuan audit. Dengan menambah variabel lain, diharapkan dapat menjelaskan skor kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah lebih baik.
10. Bagi pemerintah daerah provinsi di Indonesia disarankan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mencapai status kinerja yang sangat tinggi, khususnya untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.